

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Telaah Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu akan sangat bermakna jika judul-judul penelitian yang digunakan sebagai bahan pertimbangan sangat bersinggungan dengan penelitian yang hendak dilakukan. Biasanya penelitian terdahulu yang digunakan adalah penelitian yang terkait langsung dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dengan demikian, akan terhindar pengulangan atau bahkan plagiasi karya ilmiah. Tujuan dicantumkannya penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui bangunan keilmuan yang sudah diletakkan oleh orang lain, sehingga penelitian yang akan dilakukan benar-benar baru dan belum diteliti oleh orang lain. Dengan kata lain, dengan menelaah penelitian terdahulu, seseorang akan dengan mudah melokalisasi kontribusi yang akan dibuat. (Soekanto,1990). Berikut adalah telaah penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan peneliti.

Pranadji (2006) melakukan penelitian mengenai penguatan modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat pedesaan dalam pengelolaan agroekosistem lahan kering (ALK). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan alat analisis secara *cross-section*. Hasil penelitian dengan alat analisis tersebut menyebutkan bahwa secara historis dapat dikatakan desa yang masyarakatnya memiliki modal sosial yang relatif kuat, maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya cenderung tinggi dan proses transformasi sosial ekonominya berlangsung lebih cepat.

Masdin (2002) mengadakan penelitian mengenai modal sosial sebagai sarana pengembangan masyarakat studi kasus dilaksanakan di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa, Provinsi Sulawesi Selatan. Tujuan dari penelitian yakni pertama, untuk mengetahui bentuk dan peran modal sosial dalam pengembangan masyarakat yang dikhususkan pada aspek pertanian, kedua mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuhnya modal sosial pada aspek pertanian di dalam pengembangan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Bentuk modal sosial dapat diketahui dengan tingginya nilai-nilai kemasyarakatan yang ditandai dengan sikap gotong royong di desa Sumberjo.

Ujiyanto (2004) meneliti mengenai modal sosial dan ketahanan ekonomi keluarga miskin pada komunitas Bantaran Ciliwung. Tujuan penelitian yakni menemukan modal sosial komunitas di Bantaran Ciliwung untuk mempengaruhi ketahanan ekonomi keluarga miskin. Pendekatan yang dilakukan yakni pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Hasil Analisis kuantitatif bahwa ditemukan hubungan bermakna yang kuat diantara variabel yang di uji terhadap ketahanan ekonomi keluarga miskin. Sedangkan dalam analisis kualitatif ditemukan bahwa ketahanan ekonomi keluarga miskin ditentukan sifat komunitas yang mandiri, ulet dan selalu melakukan penyesuaian terhadap tekanan ekonomi yang terjadi sehingga mereka dapat bertahan hidup.

Berdasarkan beberapa telaah penelitian tersebut terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara penilitan ini dengan penelitian terdahulu. Berikut adalah persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan terdahulu yang disajikan dalam bentuk tabel.









2.2 Modal Sosial

Modal sosial bisa dikatakan sebagai sumber daya sosial yang dimiliki oleh masyarakat. Sebagai sumberdaya, modal sosial memberi kekuatan atau daya dalam beberapa kondisi-kondisi sosial dalam masyarakat. Sebenarnya dalam kehidupan manusia dikenal beberapa jenis modal, yaitu: *natural capital*, *humancapital*, *physical capital* dan *financial capital*. Modal sosial akan mendorong keempat modal diatas dapat digunakan lebih optimal lagi.

Konsep modal sosial yang dijadikan fokus kajian, pertama kali dikemukakan oleh Coleman (Portes, 2001) yang mendefinisikan sebagai aspek-aspek dari struktur hubungan antar individu yang memungkinkan mereka menciptakan nilai-nilai baru. Putnam (1992) menyebutkan bahwa modal sosial tersebut mengacu pada aspek-aspek utama dari organisasi sosial, seperti kepercayaan (*trust*), norma sosial (*social norms*) dan jaringan sosial (*social network*) yang dapat meningkatkan efisiensi dalam suatu masyarakat (Lubis, 2001).

Menurut Lubis (2001) menjelaskan bahwa modal sosial adalah sumber daya yang berintikan elemen-elemen pokok yang mencakup :

1. Saling percaya (*trust*), adalah kecenderungan untuk menempati yang telah dikatakan baik secara lisan maupun tulisan. Adanya sifat kepercayaan ini merupakan landasan utama bagi seseorang untuk menyerahkan sesuatu kepada orang lain, dengan keyakinan bahwa yang bersangkutan akan menempati janji atau memenuhi kewajiban. Hal ini meliputi adanya kejujuran (*honesty*), kewajaran (*fairness*), sikap egaliter (*egalitarisme*), toleransi (*tolerance*) dan kemurahan hati (*generosity*).
2. Jaringan sosial (*network*), yang meliputi adanya partisipasi (*participatoins*), pertukaran timbal balik (*reciprocity*), solidaritas yaitu kesediaan untuk secara ikut menanggung suatu kensekuensi sebagai wujud adanya rasa kebersamaan dalam menghadapi suatu masalah, kerjasama (*collaboration*) dan keadilan (*equity*).
3. Norma sosial (*social norms*) terdiri dari pemahaman-pemahaman, nilai-nilai, harapan-harapan dan tujuan-tujuan yang diyakini dan dijalankan bersama oleh sekelompok orang. Norma-norma dapat bersumber dari agama, panduan moral,

maupun standar-standar sekuler seperti halnya kode etik profesional. Norma-norma dapat merupakan pra-kondisi maupun produk dari kepercayaan sosial.

Portes (2001) menyebutkan bahwa modal sosial ini sebenarnya memiliki arti yang berbeda, yakni modal sosial dalam arti individu biasa dan modal sosial dalam arti kolektif. Menurutnya seorang individu bisa juga memiliki modal sosial yang berguna bagi aktualisasi dirinya, begitu juga dengan kelompok masyarakat juga memiliki modal sosial yang dapat digunakan dalam mengoptimalkan potensi terbaiknya. Sama seperti pengertian dari modal fisik dan modal manusia, modal sosial mengacu pada organisasi sosial dengan jaringan sosial, norma-norma, dan kepercayaan sosial yang dapat menjembatani terciptanya kerjasama dalam komunitas sehingga terjalin kerjasama yang saling menguntungkan. (Putnam,1992).

Stoner dan Freeman (1994) meyakini modal sosial adalah sebagai sesuatu yang merujuk kedemensi institusional, hubungan-hubungan yang tercipta, dan norma-norma yang membentuk kualitas serta kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat. Modal sosial bukanlah sekedar deretan jumlah institusi atau kelompok yang menopang (*underpinning*) kehidupan sosial, melainkan dengan spektrum yang lebih luas yaitu sebagai perekat (*social glue*) yang menjaga kesatuan anggota kelompok secara bersama-sama. Dimensi modal sosial tumbuh di dalam suatu masyarakat yang di dalamnya berisi nilai dan norma serta pola-pola interaksi sosial dalam mengatur kehidupan keseharian anggotanya (Woolcock dan Narayan, 2001). Oleh karena itu Adler dan Kwon (2000) menyatakan, dimensi modal sosial merupakan gambaran dari keterikatan internal yang mewarnai struktur kolektif dan memberikan kohesifitas dan keuntungan-keuntungan bersama dari proses dinamika sosial yang terjadi di dalam masyarakat.

Modal sosial dibangun berdasarkan saling kepercayaan untuk menghasilkan hasil positif bagi semua pihak. Khrisnamurti (2002) menyatakan bahwa sebuah tindakan sosial yang sama dapat dilakukan dengan dua kekuatan pendorong yang berbeda (lihat tabel 4). Pertama, bersifat institusional, misalnya dorongan oleh peran pemimpin yang diakui dalam komunitas tersebut untuk melakukan suatu tindakan kolektif. Kekuatan pendorong ini kemudian disebut modal institusional. Modal institusional bersifat terstruktur. Peraturan dan tata cara yang ada untuk

relasional dapat membentuk modal sosial yang tinggi atau tidak sama sekali. Tugas yang dimaksudkan di dalam kolom ini merupakan suatu kegiatan yang dapat dilakukan pada suatu kondisi dan merupakan tugas yang dilakukan untuk menguatkan yang lemah. Misalnya pada kolom (2), kondisi dimana modal institusional kuat akan tetapi modal relasionalnya lemah. Kondisi ini menciptakan organisasi kuat. Namun untuk membuat kondisi ideal atau menguatkan modal relasional maka dapat dilakukan tugas legitimasi dan intensifikasi.

2.3 Elemen-elemen Modal Sosial

Modal sosial didefinisikan berangkat dari pengertian bahwa suatu komunitas dapat bertahan dengan sebuah substansi penting dari modal sosial, dimana modal ini mempunyai komponen penting yaitu keterlibatan aktif dalam pengembangan jaringan sosial, norma-norma yang sudah terinternalisasi dan kepercayaan sosial Putnam (1992). Modal sosial mempunyai tiga pilar utama yaitu saling percaya (*trust*), jaringan sosial (*social network*) dan norma sosial (*social norms*).

2.3.1 Kepercayaan (*trust*) sebagai Modal Sosial

Menurut Fukuyama berpendapat *trust* (kepercayaan) merupakan dasar dalam sebuah tatanan sosial “komunitas-komunitas tergantung pada kepercayaan timbal balik akan muncul secara spontan”. *Trust* (kepercayaan) merupakan salah satu unsur dari modal sosial. *Trust* (kepercayaan) menjadi unsur yang paling penting dalam modal sosial yang merupakan perekat bagi langgengnya hubungan dalam kelompok masyarakat. Dengan menjaga suatu kepercayaan orang-orang bisa bekerjasama secara efektif (Gambetta, 2000).

Defenisi kepercayaan (*trust*) dalam Oxford English Dictionary dijelaskan sebagai *confidence in* yang berarti yakin pada dan *reliance on* yang bermakna percaya atas beberapa kualitas atau atribut sesuatu atau seseorang, kebenaran suatu pernyataan (Durkheim, 1973). Kepercayaan pada dasarnya terikat, bukan kepada resiko, namun kepada berbagai kemungkinan. Kepercayaan selalu mengandung konotasi keyakinan ditengah-tengah berbagai akibat yang serba mungkin.

Menurut (Durkheim,1973) memberikan batasan kepercayaan sebagai perangkat harapan yang dimiliki bersama-sama oleh semua yang berada dalam pertukaran. Kepercayaan memperbesar kemampuan manusia untuk bekerjasama. Kerjasama tidak mungkin terjalin kalau didasarkan atas adanya saling percaya diantara sesama pihak yang terlibat. Kepercayaan meningkatkan toleransi terhadap ketidakpastian. Penetralan merupakan suatu bentuk toleransi yang dilakukan ketidakpastian. Kepercayaan merupakan hubungan antara dua belah pihak atau lebih yang mengandung harapan yang menguntungkan salah satu belah pihak melalui interaksi sosial (Gambetta,2000). Selanjutnya Lawang menyimpulkan inti konsep kepercayaan sebagai berikut:

1. Hubungan sosial antara dua orang atau lebih, termasuk dalam hubungan ini adalah institusi, yang dalam pengertian ini diwakili orang.
2. Harapan yang ada akan tergantung dalam hubungan itu, yang kalau direalisasikan tidak akan merugikan salah satu atau kedua belah pihak
3. Interaksi yang memungkinkan hubungan dan harapan itu berwujud.

Kepercayaan terbagi dalam tiga klasifikasi, yaitu:

- a. Kepercayaan pada individu dimana kepercayaan merupakan bagian dari moralitas dan adab yang selalu melekat pada karakter setiap individu. Kepercayaan ini terbentuk bila seorang dapat memenuhi harapan orang lain sesuai janji (*promise keeping*) sesuai yang telah di sepakati. Hal ini menunjukkan adanya nilai mengemban amanah.
- b. Kepercayaan pada kelompok dan kelembagaan yang menjadi karakter moral kelompok dan institusi. Kepercayaan ini termasuk regulasi dan beragam bentuk *agreed institutional agreement* yang digunakan dalam rangka menjaga amanah di tingkat group sosial secara efektif.
- c. Kepercayaan pada sistem yang abstrak seperti ideologi dan religi yang membantu setiap individu dalam mengoperasionalkan kepercayaan dalam hubungan bermasyarakat.

Modal sosial mencakup kepercayaan sosial yang memfasilitasi adanya koordinasi dan komunikasi. Koordinasi dan komunikasi yang terjalin ini akan mempengaruhi terhadap tindakan kolektif yang dilakukan dalam rangka mencapai keuntungan kolektif juga. Modal sosial dalam membangun ikatan sosialnya

dilandasi dengan kepercayaan (*trust*). Sehingga modal sosial akan bermakna lebih menjadi aset sosial yang dikuasai dan dioperasionalkan dalam sistem sosialnya. Ikatan sosial yang terbentuk dari dibangunnya kepercayaan akan membentuk jaringan ikatan sosial yang merupakan infrastruktur komunitas yang dibentuk secara sengaja (Fukuyama, 2002).

2.3.2 Jaringan Sosial (*Social Network*) Sebagai Modal Sosial

Jaringan sosial merupakan hubungan-hubungan yang tercipta antara banyak individu dalam suatu kelompok ataupun antar suatu kelompok dengan kelompok ataupun antar suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Mengatakan bahwa satu ciri khas teori jaringan adalah pemusatan perhatiannya pada struktur mikro hingga makro. Artinya, bagi teori jaringan aktor (pelaku) mungkin saja individu tetapi mungkin pula kelompok, perusahaan dan masyarakat. Hubungan dapat terjadi struktur sosial skala luas maupun ditingkat yang lebih sempit. (Coleman, 1999).

Jaringan sosial dihubungkan dengan bagaimana individu terkait satu dengan yang lainnya dan bagaimana ikatan aplikasi melayani baik sebagai pelicin untuk memperoleh sesuatu yang dikerjakan maupun sebagai perekat yang memberikan tatanan dan makna pada kehidupan sosial (Durkheim, 1973). Sedangkan (Coleman, 1999) menjelaskan bahwa ada tiga jaringan sosial adalah :

1. Jaringan individu (*ego centric*) adalah sebuah jaringan yang berhubungan dengan model tunggal atau individu, contohnya teman baik saya. Dalam hal ini ada satu titik (*point*) yang akan menjadi sentral pengamatan.
2. Sedangkan jaringan sosial (*social-centric*) digambarkan dalam model dan batasan analisisnya, seperti jaringan antar mahasiswa dalam sebuah kelas, jaringan pekerja dan manajemen dalam sebuah pabrik atau tempat kerja. Jadi jaringan dibentuk dengan model jaringan tertutup dan yang paling penting jaringan ini mempelajari dan cari struktur dari jaringan yang ada dalam batasan wilayah yang sudah ditentukan tersebut.
3. Jaringan terbuka (*open system*) batasan tidak dianggap penting. Sebagai contoh, jaringan elit politik, jaringan antar perusahaan, jaringan antar mahasiswa dan lain-lain.

Ada empat bentuk kekuatan yang dapat dilihat dari suatu jaringan sosial yaitu:

1. *Intensity* adalah kekuatan hubungan dapat diukur dari derajat atau frekuensi kontak individu dalam komunitas tersebut pada waktu tertentu.
2. *Reciprocity* adalah derajat individu-individu dalam komunitas tersebut untuk melakukan pertukaran secara timbal balik.
3. Kejelasan terhadap pengharapan dari hubungan yang terjalin antar individu dalam komunitas yang diamati.
4. *Multiplexity* adalah derajat jenis banyak peran yang dilakoni oleh individu dalam komunitas atau pranata. (Coleman, 1999).

Jaringan sosial merupakan sebuah hubungan sosial yang terpola atau disebut juga pengorganisasian sosial. Jaringan sosial juga menggambarkan jaring-jaring hubungan antara sekumpulan orang yang saling terkait baik langsung maupun tidak langsung. (Putnam,1992). Membahas jaringan sosial, tentu saja tidak bisa lepas dari komunikasi yang terjalin antar individu (*interpersonal communication*) sebagai unit analisis dan perubahan perilaku yang disebabkan. Hal ini, menunjukkan bahwa jaringan sosial terbangun dari komunikasi antar individu yang memfokuskan pada pertukaran informasi sebagai sebuah proses untuk mencapai tindakan bersama, kesepakatan bersama dan pengertian bersama. Jaringan sosial dilihat dengan menggunakan beberapa ukuran, yaitu : (a) ikatan informal yang dikarakteristikan dengan adanya kepercayaan dan hubungan timbal balik yang lebih familiar dan bersifat personal seperti pada ikatan keluarga, pertemanan, pertetanggaan; (b) ikatan yang sifatnya lebih umum , seperti ikatan pada masyarakat setempat, masyarakat umum, masyarakat dalam kesatuan kewarganegaraan. Ikatan ini dikarakteristikan dengan adanya kepercayaan dan hubungan timbal balik yang sifatnya umum; dan (c) ikatan kelembagaan yang dikarakteristikan dengan adanya kepercayaan dalam kelembagaan yang ada. Misalnya, pada ikatan dalam sistem kelembagaan dan hubungan keluasaan (Stoner dan Freeman,1994).

Coleman (1999) sebagai salah seorang penggagas konsep modal sosial melihat bahwa jaringan (*networks*) dalam modal sosial merupakan konsekuensi yang telah ada ketika kepercayaan diterapkan secara meluas dan didalamnya

terdapat hubungan timbal balik yang terjalin dalam masyarakat dengan adanya harapan-harapan dalam masyarakat.

2.3.3 Norma Sosial (*Social Norms*) sebagai Modal Sosial

Norma terdiri dari pemahaman-pemahaman, nilai-nilai, harapan-harapan dan tujuan-tujuan yang diyakini dan dijalankan bersama oleh sekelompok orang (komunitas). Norma dapat bersumber dari agama, panduan moral maupun standar-standar sekuler seperti halnya kode etik profesional. Norma-norma dibangun dan diterapkan untuk mendukung iklim kerjasama (Putnam, 1993). Norma-norma merupakan prakondisi maupun produk dari kepercayaan sosial. Norma mengacu kepada adanya suatu aturan yang mengatur kegiatan dan perilaku anggota di dalamnya, bahwa norma terbentuk dalam bentuk kewajiban sosial karena adanya pertukaran yang terjadi berulang-ulang dengan memegang prinsip saling menguntungkan. Setelah itu norma membentuk suatu hak dan kewajiban bersifat resiprokal antara kedua belah pihak yang terlibat dalam pertukaran.

Pranata sosial merupakan salah satu elemen penting dan modal sosial selain dari kepercayaan dan jaringan sosial. Pranata terdiri dari nilai-nilai yang dimiliki bersama, norma-norma dan sanksi-sanksi, dan aturan-aturan (Lubis, 2001). Pranata atau lembaga adalah sistem-sistem yang menjadi wahana yang memungkinkan warga masyarakat itu untuk berinteraksi menurut pola-pola resmi (Soekanto, 1990). Di dalam pranata warga masyarakat dapat berinteraksi satu sama lain tetapi sudah diikat oleh aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Pranata sosial ini sangat bermacam bentuknya, mulai dari yang tradisional seperti masyarakat adat, sampai pada pranata yang modern seperti partai politik, koperasi, perusahaan, perguruan tinggi dan lain-lain. Menurut Koentjaraningrat (1990) ada delapan tipe dari pranata sosial, yaitu:

- a. Pranata yang berfungsi untuk memenuhi keperluan kehidupan kekerabatan
- b. Pranata-pranata yang berfungsi untuk memenuhi keperluan manusia untuk mata pencaharian hidupnya.
- c. Pranata yang berfungsi memenuhi keperluan pendidikan.
- d. Pranata yang berfungsi memenuhi keperluan ilmiah manusia
- e. Pranata yang berfungsi memenuhi keperluan manusia untuk menghayatkan rasa keindahan.

- f. Pranata yang berfungsi memenuhi keperluan manusia untuk berbakti kepada Tuhan.
- g. Pranata yang berfungsi memenuhi keperluan manusia untuk mengatur keseimbangan kekuasaan dalam masyarakat.
- h. Pranata yang berfungsi memenuhi keperluan fisik dan kenyamanan hidup manusia.

Pranata muncul disebabkan adanya keperluan dan kebutuhan manusia yang tidak dapat dipenuhi sendiri, maka munculah lembaga-lembaga masyarakat untuk memenuhi hal tersebut, dan lembaga ini muncul dengan norma masing-masing. Sosiolog tersebut menyebutkan bahwa ada tiga fungsi dari pranata ini, yaitu:

1. Memberikan pedoman pada anggota masyarakat bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat terutama menyangkut kebutuhan-kebutuhan.
2. Menjaga keutuhan masyarakat.
3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial.

Di dalam suatu pranata agar tercipta kerjasama, maka harus ada norma-norma yang mengatur. Norma-norma yang ada pada sebuah pranata dapat terbentuk secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Norma-norma yang ada di dalam masyarakat mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda, ada yang lemah dan ada pula yang kuat ikatannya (Soekanto, 1990). Norma-norma tersebut di atas akan mengalami suatu proses seiring dengan perjalanan waktu, dan pada akhirnya norma-norma itu akan menjadi bagian tertentu dan pranata sosial. (Soekanto,1990) mengatakan proses itu disebut proses pelebagaan, yaitu suatu proses yang dilewati oleh suatu norma yang baru untuk menjadi bagian dari salah satu pranata sosial. Pranata sosial dianggap sebagai peraturan apabila norma-norma tersebut membatasi serta mengatur perilaku orang-orang di dalam lingkungan pranata itu berada (Soekanto, 1990). Proses pelebagaan sebenarnya tidak berhenti demikian saja, akan tetapi dapat berlanjut lebih jauh lagi hingga suatu norma kemasyarakatan tidak hanya melembaga saja dalam kehidupan masyarakat, namun telah menginternalisasi di dalam kehidupannya.

2.4 Karakteristik Modal Sosial

Selanjutnya ada beberapa karakteristik dari modal sosial yang diungkapkan (Coleman,1999) yaitu :

- a. Adanya kewajiban dan harapan, ini dimaksudkan bahwa dalam modal sosial yang dibangun dari kepercayaan, jaringan dan norma sosial masing-masing individu mempunyai kewajiban dan harapan dalam melakukan tindakan sosialnya.
- b. Adanya informasi potensial yang terjalin melalui hubungan sosial yang sifatnya informal yang dapat menyimpan dan menyampaikan informasi.
- c. Norma-norma dan sanksi yang efektif
- d. Hubungan kekuasaan
- e. Kesamaan organisasi sosial, organisasi sosial terbentuk dari tujuan yang spesifik dimana terjadi proses pencapaian tujuan dan didalamnya terdapat mekanisme organisasi yang cukup luas skalanya dalam usaha pencapaian tujuannya.
- f. Kesengajaan dalam membentuk organisasi (hal ini terkait khususnya pada usaha untuk mengurangi biaya-biaya transaksi sosial).

2.5 Dimensi Modal Sosial

Modal sosial (*social capital*) berbeda definisi dan terminologinya dengan *human capital* (Fukuyama, 1995). Bentuk *human capital* adalah ‘pengetahuan’ dan ‘ketrampilan’ manusia. Investasi *human capital* konvensional adalah dalam bentuk seperti halnya pendidikan universitas, pelatihan menjadi seorang mekanik atau *programmer computer*, atau menyelenggarakan pendidikan yang tepat lainnya. Sedangkan modal sosial adalah kapabilitas yang muncul dari kepercayaan umum di dalam sebuah masyarakat atau bagian-bagian tertentu darinya. Modal sosial dapat dilembagakan dalam bentuk kelompok sosial paling kecil atau paling mendasar dan juga kelompok-kelompok masyarakat paling besar seperti halnya negara (bangsa).

Modal sosial ditransmisikan melalui mekanisme-mekanisme kultural seperti agama, tradisi, atau kebiasaan sejarah (Fukuyama, 2002). Modal sosial dibutuhkan untuk menciptakan jenis komunitas moral yang tidak bisa diperoleh

seperti dalam kasus bentuk-bentuk *human capital*. Akuisisi modal sosial memerlukan pembiasaan terhadap norma-norma moral sebuah komunitas dan dalam konteksnya sekaligus mengadopsi kebijakan-kebijakan seperti kesetiaan, kejujuran, dan *dependability*. Modal sosial lebih didasarkan pada kebijakan-kebijakan sosial umum.

Dimensi modal sosial menggambarkan segala sesuatu yang membuat masyarakat bersekutu untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kebersamaan, serta di dalamnya diikat oleh nilai-nilai dan norma-norma yang tumbuh dan dipatuhi (Dasgupta,1999). Dimensi modal sosial *inheren* dalam struktur relasi sosial dan jaringan sosial di dalam suatu masyarakat yang menciptakan berbagai ragam kewajiban sosial, menciptakan iklim saling percaya, membawa saluran informasi, dan menetapkan norma-norma, serta sangsi-sangsi sosial bagi para anggota masyarakat tersebut (Coleman, 1999).

Namun demikian Fukuyama (1998) dengan tegas menyatakan, belum tentu norma-norma dan nilai-nilai bersama yang dipedomani sebagai acuan bersikap, bertindak, dan bertingkah-laku itu otomatis menjadi modal sosial. Akan tetapi hanya norma-norma dan nilai-nilai bersama yang dibangkitkan oleh kepercayaan (*trust*). Dimana *trust* ini adalah merupakan harapan-harapan terhadap keteraturan, kejujuran, dan perilaku kooperatif yang muncul dari dalam sebuah komunitas masyarakat yang didasarkan pada norma-norma yang dianut bersama oleh para anggotanya.

Norma-norma tersebut bisa berisi pernyataan-pernyataan yang berkisar pada nilai-nilai luhur (kebijakan) dan keadilan. Setidaknya dengan mendasarkan pada konsepsi-konsepsi sebelumnya, maka dapat ditarik suatu pemahaman bahwa dimensi dari modal sosial adalah memberikan penekanan pada kebersamaan masyarakat untuk mencapai tujuan memperbaiki kualitas hidupnya dan senantiasa melakukan perubahan dan penyesuaian secara terus menerus. Di dalam proses perubahan dan upaya mencapai tujuan tersebut, masyarakat senantiasa terikat pada nilai-nilai dan norma-norma yang dipedomani sebagai acuan bersikap, bertindak, dan bertingkah laku, serta berhubungan atau membangun jaringan dengan pihak lain. Beberapa acuan nilai dan unsur yang merupakan ruh modal sosial antara lain: sikap yang partisipatif, sikap yang saling memperhatikan, saling

memberi dan menerima, saling percaya mempercayai dan diperkuat oleh nilai-nilai dan norma-norma yang mendukungnya. Unsur lain yang memegang peranan penting adalah kemauan masyarakat untuk secara terus menerus proaktif baik dalam mempertahankan nilai, membentuk jaringan kerjasama maupun dengan penciptaan kreasi dan ide-ide baru. Inilah jati diri modal sosial yang sebenarnya.

Oleh karena itu menurut Jousairi (2006), dimensi inti telaah dari modal sosial terletak pada bagaimana kemampuan masyarakat untuk bekerjasama membangun suatu jaringan guna mencapai tujuan bersama. Kerjasama tersebut diwarnai oleh suatu pola *interrelasi* yang imbal balik dan saling menguntungkan serta dibangun diatas kepercayaan yang ditopang oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial yang positif dan kuat. Kekuatan tersebut akan maksimal jika didukung oleh semangat proaktif membuat jalinan hubungan diatas prinsip-prinsip sikap yang partisipatif, sikap yang saling memperhatikan, saling memberi dan menerima, saling percaya mempercayai dan diperkuat oleh nilai-nilai dan norma-norma yang mendukungnya.

2.6 Tipologi Modal Sosial

Mereka yang memiliki perhatian terhadap modal sosial pada umumnya tertarik untuk mengkaji kerekatan hubungan sosial dimana masyarakat terlibat didalamnya, terutama kaitannya dengan pola-pola interaksi sosial atau hubungan sosial antar anggota masyarakat atau kelompok dalam suatu kegiatan sosial. Bagaimana keanggotaan dan aktivitas mereka dalam suatu asosiasi sosial merupakan hal yang selalu menarik untuk dikaji. Dimensi lain yang juga sangat menarik perhatian adalah yang berkaitan dengan tipologi modal sosial, yaitu bagaimana perbedaan pola-pola interaksi berikut konsekuensinya antara modal sosial yang berbentuk *bonding* (eksklusif) atau *bridging* (inklusif). Keduanya memiliki implikasi yang berbeda pada hasil-hasil yang dapat dicapai dan pengaruh-pengaruh yang dapat muncul dalam proses kehidupan dan pembangunan masyarakat.

(a) Modal Sosial Terikat (*Bonding Social Capital*)

Modal sosial terikat adalah cenderung bersifat eksklusif (Hasbullah, 2006). Apa yang menjadi karakteristik dasar yang melekat pada tipologi ini, sekaligus sebagai ciri khasnya, dalam konteks ide, relasi dan perhatian, adalah lebih berorientasi ke dalam (*inward looking*) dibandingkan dengan berorientasi keluar (*outward looking*). Ragam masyarakat yang menjadi anggota kelompok ini pada umumnya homogenius (cenderung homogen). Di dalam bahasa lain *bonding social capital* ini dikenal pula sebagai ciri *sacred society*. Menurut Putman (1993), pada masyarakat *sacred society* mendominasi dan mempertahankan struktur masyarakat yang totalitarian, *hierarchical*, dan tertutup. Di dalam pola interaksi sosial sehari-hari selalu dituntun oleh nilai-nilai dan norma-norma yang menguntungkan level hierarki tertentu dan feodal. Hasbullah (2006) menyatakan, pada masyarakat yang *bonded* atau *inward looking* meskipun hubungan sosial yang tercipta memiliki tingkat kohesifitas yang kuat, akan tetapi kurang merefleksikan kemampuan masyarakat tersebut untuk menciptakan dan memiliki modal sosial yang kuat. Kekuatan yang tumbuh sekedar dalam batas kelompok dalam keadaan tertentu, struktur hierarki feodal, kohesifitas yang bersifat *bonding*.

Secara umum pola yang demikian ini akan lebih banyak membawa pengaruh negatif dibandingkan dengan pengaruh positifnya. Kekuatan interaksi sosial terkadang berkecenderungan untuk menjauhi, menghindari, bahkan pada situasi yang ekstrim mengidap kebencian terhadap masyarakat lain di luar kelompok, *group*, asosiasi dan sukunya. Oleh karena itu di dalam keikatannya dengan upaya pembangunan masyarakat di negara-negara berkembang saat ini, mengidentifikasi dan mengetahui secara seksama tentang kecenderungan dan konfigurasi modal sosial di masing-masing daerah menjadi salah satu kebutuhan utama.

(b) Modal Sosial yang Menjembatani (*Bridging Social Capital*)

Mengikuti Jousairi (2006), bentuk modal sosial yang menjembatani ini ini biasa juga disebut bentuk modern dari suatu pengelompokan, *group*, asosiasi, atau masyarakat. Prinsip-prinsip pengorganisasian yang dianut didasarkan pada prinsip-prinsip universal tentang: (a) persamaan, (b) kebebasan, serta (c) nilai-nilai kemajemukan dan humanitarian (kemanusiaan, terbuka, dan mandiri). Prinsip persamaan, bahwasanya setiap anggota dalam suatu kelompok masyarakat

memiliki hak-hak dan kewajiban yang sama. Pimpinan kelompok masyarakat hanya menjalankan kesepakatan-kesepakatan yang telah ditentukan oleh para anggota kelompok. Prinsip kebebasan, bahwasanya setiap anggota kelompok bebas berbicara, mengemukakan pendapat dan ide yang dapat mengembangkan kelompok tersebut. Iklim kebebasan yang tercipta memungkinkan ide-ide kreatif muncul dari dalam (kelompok), yaitu dari beragam pikiran anggotanya yang kelak akan memperkaya ide-ide kolektif yang tumbuh dalam kelompok tersebut.

Prinsip kemajemukan dan humanitarian, bahwasanya nilai-nilai kemanusiaan, penghormatan terhadap hak asasi setiap anggota dan orang lain yang merupakan prinsip dasar dalam pengembangan asosiasi, group, kelompok, atau suatu masyarakat. Kehendak kuat untuk membantu orang lain, merasakan penderitaan orang lain, berempati terhadap situasi yang dihadapi orang lain, adalah merupakan dasar-dasar ide humanitarian. Sebagai konsekuensinya, masyarakat yang menyandarkan pada *bridging socialcapital* biasanya heterogen dari berbagai ragam unsur latar belakang budaya dan suku. Setiap anggota kelompok memiliki akses yang sama untuk membuat jaringan atau koneksi keluar kelompoknya dengan prinsip persamaan, kemanusiaan, dan kebebasan yang dimiliki. *Bridging social capital* akan membuka jalan untuk lebih cepat berkembang dengan kemampuan menciptakan *networking* yang kuat, menggerakkan identitas yang lebih luas dan *reciprocity* yang lebih variatif, serta akumulasi ide yang lebih memungkinkan untuk berkembang sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan yang lebih diterima secara universal.

Mengikuti Coleman (1999), tipologi masyarakat *bridging social capital* dalam gerakannya lebih memberikan tekanan pada dimensi *fight for* (berjuang untuk). Yaitu yang mengarah kepada pencarian jawaban bersama untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh kelompok (pada situasi tertentu, termasuk problem di dalam kelompok atau *problem* yang terjadi di luar kelompok tersebut). Pada keadaan tertentu jiwa gerakan lebih diwarnai oleh semangat *fight againts* yang bersifat memberi perlawanan terhadap ancaman berupa kemungkinan runtuhnya simbol-simbol dan kepercayaan-kepercayaan tradisional yang dianut oleh kelompok masyarakat. Pada kelompok masyarakat yang

demikian ini, perilaku kelompok yang dominan adalah sekedar *sense of solidarity* (*solidarity making*).

Bentuk modal sosial yang menjembatani (*bridging capital social*) umumnya mampu memberikan kontribusi besar bagi perkembangan kemajuan dan kekuatan masyarakat. Hal ini memungkinkan perkembangan di banyak dimensi kehidupan, semakin efisiennya pekerjaan-pekerjaan pemerintah, mempercepat keberhasilan upaya penanggulangan kemiskinan, kualitas hidup manusia akan meningkatkan dan bangsa menjadi jauh lebih kuat.

Tabel 5. Modal Sosial Terikat dan Modal Sosial Menjembatani

| <i>Bonding Social Capital</i> | <i>Bridging Social Capital</i> |
|---|---|
| a. Terikat/ketat, raingan yang eksklusif | a. Terbuka |
| b. Perbedaan yang kuat antara “orang kami” dan “orang luar” | b. Memiliki jaringan yang lebih fleksibel |
| c. Hanya ada satu alternatif jawaban | c. Toleran |
| d. Kurang akomodatif terhadap pihak luar | d. Memungkinkan untuk memiliki banyak alternatif jawaban dan penyelesaian masalah |
| e. Mengutamakan kepentingan kelompok | e. Akomodatif untuk menerima perubahan |
| f. Mengutamakan solidaritas kelompok | f. Cenderung memiliki sikap yang altruistik, humanitaristik, dan universal. |

Sumber: Jousairi, 2006 (diolah).

Persoalannya menurut Jousairi (2006), fakta yang ada di negara-negara berkembang menunjukkan kecenderungan bahwa dampak positif modal sosial dari mekanisme *outward looking* tidak berjalan seperti yang di idealkan. Walaupun asosiasi yang dibangun oleh masyarakat dengan keaggotaannya yang heterogen dan dibentuk dengan fokus dan jiwa untuk mengatasi problem sosial ekonomi masyarakat (*problem solving oriented*), akan tetapi tidak mampu bekerja secara optimal.

2.7 Indikator Keberhasilan Modal Sosial

Berdasarkan elemen modal sosial yang telah disebutkan, ada beberapa indikator kunci yang dapat dijadikan ukuran modal sosial, antara lain (Suharto, 2005) :

1. Perasaan identitas
2. Perasaan memiliki atau sebaliknya, perasaan *alineaasi*
3. Sistem kepercayaan dan ideologi

4. Nilai-nilai dan tujuan-tujuan
5. Ketakutan-ketakutan
6. Sikap-sikap terhadap anggota lain dalam masyarakat
7. Persepsi mengenai akses dengan pelayanan, sumber, dan fasilitas (misalnya pekerjaan, pendapatan, pendidikan, perumahan, kesehatan, transportasi, jaminan sosial).
8. Opini mengenai kinerja pemerintah yang telah dilakukan terdahulu
9. Keyakinan dalam lembaga-lembaga masyarakat dan orang-orang pada umumnya
10. Tingkat kepercayaan
11. Kepuasan dalam hidup dalam bidang-bidang kemasyarakatan lainnya
12. Harapan-harapan yang ingin dicapai di masa depan.

2.8 Pemberdayaan Masyarakat

2.8.1 Definisi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “*people centred, participatory, empowering, and sustainable*” (Khrisnamurti, 2002). Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu. Konsep ini berkembang dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari apa yang antara lain oleh Khrisnamurti (2002) disebut sebagai *alternative development*, yang menghendaki “*inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and intergenerational equity*”. (Kartasasmita, 1996).

Upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu (Sumodiningrat, 1999); *pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya dan potensi karena jika demikian pasti sudah punah. Pemberdayaan adalah

upaya untuk membangun daya dan potensi tersebut, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. *Kedua*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, tidak hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta ketersediaan akses kedalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya.

Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata yang terkait. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaruan institusis sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Hal terpenting disini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri sendiri dan masyarakat. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat sangat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan dan pengamalan demokrasi. *Ketiga*, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, karena ketidakberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah sangat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat.

Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutup diri dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melemahkan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi semakin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dibagikan (*share*) dengan pihak lain). Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, mendayagunakan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

2.8.2 Konsep Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat (Hikmat, 2006). Pembangunan tidak lagi berpusat pada pemerintah tetapi juga dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah seringkali terhambat oleh karena pemerintah tidak mengetahui untuk siapa, apa pendekatan yang sesuai, dan bagaimana caranya program pembangunan tersebut dilaksanakan. Program pembangunan yang terpusat pada pemerintah seringkali mencapai tujuannya secara makro namun pada hakikatnya komunitas yang berada di tingkat mikro tidak mendapat pengaruh ataupun tidak dijangkau oleh pembangunan tersebut.

Sosiologi struktural fungsionalis Nahapiet (1998) menyatakan bahwa konsep *power* dalam masyarakat adalah variabel jumlah. *Power* masyarakat adalah kekuatan masyarakat secara keseluruhan yang disebut sebagai tujuan kolektif. Misalnya, masyarakat diberdayakan berdasarkan kebutuhan yang merekasakan. Weber dalam Hikmat (2006) mendefinisikan *power* sebagai kemampuan seseorang atau individu atau kelompok untuk mewujudkan keinginannya. Pada akhirnya kekuatan (*power*) adalah kemampuan untuk mendapatkan atau mewujudkan tujuan (Hikmat,2006). Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Mandiri berarti masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya (baik secara individu ataupun kolektif) melalui usaha yang dilakukan dan tidak bergantung pada yang lain. Jaringan kerja merupakan kerangka kerjasama yang dilakukan oleh *stakeholder* yaitu pemerintah, swasta, LSM, dan masyarakat sehingga pembangunan tidak merugikan pihak manapun dan dapat memberikan hasil yang merata yang merupakan konsep keadilan (kesejahteraan yang merata).

Partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan semua pihak yang berkaitan termasuk masyarakat itu sendiri. Masyarakat diberi kesempatan untuk ikut merencanakan, melaksanakan, dan menilai. Strategi pembangunan meletakkan partisipasi masyarakat sebagai fokus isu sentral pembangunan sementara itu strategi pemberdayaan meletakkan partisipasi aktif masyarakat ke dalam

efektivitas, efisiensi, dan sikap kemandirian (Hikmat,2006). Partisipasi masyarakat merupakan potensi yang dapat digunakan untuk melancarkan pembangunan. Prinsip pembangunan yang partisipatif menegaskan bahwa rakyat harus menjadi pelaku utama dalam pembangunan dengan kata lain pembangunan tersebut bersifat *bottom up* (dari bawah ke atas). Pemerintah tidak lagi berperan sebagai penyelenggara akan tetapi telah bergeser menjadi fasilitator, mediator, koordinator, pendidik, ataupun mobilisator. Adapun peran dari organisasi lokal, organisasi sosial, LSM dan kelompok masyarakat lebih dipacu sebagai agen pelaksana perubahan dan pelaksana program.

2.8.3 Tahap-tahap Pemberdayaan

Pada hakekatnya, pemberdayaan merupakan suatu kegiatan yang lebih menekankan proses, tanpa bermaksud menafikkan hasil dari pemberdayaan itu sendiri. Dalam kaitannya dengan proses, maka partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pemberdayaan mutlak diperlukan. Bahwa pemberdayaan menekankan pada *process goal*, yaitu tujuan yang berorientasi pada proses yang mengupayakan integrasi masyarakat dan dikembangkan kapasitasnya guna memecahkan masalah mereka secara kooperatif atas dasar kemauan dan kemampuan menolong diri sendiri (*self help*) sesuai prinsip demokratis. Dengan menekankan pada proses, maka pemberdayaan pun memiliki tahap-tahap sebagai berikut (Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, 2007).

a. Penayadaran

Pada tahap ini, dilakukan sosialisasi terhadap komunitas agar mereka mengerti bahwa kegiatan pemberdayaan ini penting bagi peningkatan kualitas hidup mereka, dan dilakukan secara mandiri (*self help*).

b. Pengkapasitasan (*Capacity building*)

Sebelum diberdayakan, komunitas perlu diberikan kecakapan dalam mengelolanya. Tahap ini sering disebut sebagai *capacity buliding*, yang terdiri atas pengkapasitasan manusia, organisasi dan sistem nilai.

c. Pendayaan

Pada tahap ini, target diberikan daya, kekuasaan, dan peluang sesuai dengan kecakapan yang sudah diperolehnya.

Tahapan program pemberdayaan masyarakat ataupun pengembangan masyarakat merupakan sebuah siklus perubahan yang berusaha mencapai taraf kehidupan yang lebih baik.

2.8.4 Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat

Sumodiningrat (2002) juga merumuskan indikator keberhasilan yang dipakai untuk mengukur pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat ini, antara lain: (1) berkurangnya jumlah penduduk miskin ; (2) berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia; (3) meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya ; (4) meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok, serta makin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain di dalam masyarakat; serta (5) meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya.

2.9 Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

2.9.1 Definisi Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Sumodiningrat (1999) menyatakan bahwa perekonomian rakyat merupakan padanan istilah ekonomi rakyat yang berarti perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat merupakan usaha ekonomi yang menjadi sumber penghasilan keluarga. Ekonomi rakyat berbeda dengan ekonomi kerakyatan. Ekonomi rakyat merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat itu sendiri dengan menggunakan sumber daya yang mereka miliki dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu pangan, sandang, dan papan. Sedangkan ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan rakyat. Konsep ekonomi rakyat ini tidak membedakan antara 'rakyat' dengan 'bukan rakyat' karena akan menimbulkan asumsi tentang 'elite'. Istilah rakyat dalam konsep ini berarti warga negara Indonesia secara menyeluruh yang berperan dalam pembangunan dengan

kesempatan dan peluang yang sama. Menurut (Sumodiningrat,1990) istilah ekonomi rakyat dapat diartikan ekonomi usaha kecil sebagai upaya pemihakan.

Upaya pemihakan disini dimaksudkan agar pembangunan dapat memberikan kesejahteraan yang adil dan merata. Tidak hanya kelompok-kelompok tertentu yang dapat menikmati hasil-hasil pembangunan, akan tetapi seluruh warga negara yang mempunyai peran dapat juga menikmati hasil pembangunan. Khrisnamurthi (2002) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi rakyat adalah kegiatan ekonomi rakyat banyak dan pengertian dari ekonomi rakyat (banyak) adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang banyak dengan skala kecil-kecil, dan bukan kegiatan ekonomi yang dikuasai oleh beberapa orang dengan perusahaan dan skala besar, walaupun yang disebut terakhir pada hakekatnya adalah juga rakyat Indonesia.

2.9.2 Karakteristik Ekonomi Rakyat

Ekonomi rakyat juga memiliki karakteristik meskipun sebenarnya karakteristik ekonomi rakyat sangat beragam dan tergantung dari jenis kegiatannya. Namun Ismawan (2002) menyebutkan bahwa ekonomi rakyat memiliki lima karakteristik, yaitu:

1. Informalitas, sebagian besar ekonomi rakyat melakukan kegiatannya diluar kerangka legal dan pengaturan yang ada. Hal ini disebabkan dengan rendahnya efektivitas kebijakan pemerintah sehingga ekonomi rakyat mampu berkembang.
2. Mobilitas, karakteristik ini merupakan dampak dari informalitas. Informalitas membawa konsekuensi tidak adanya jaminan bagi keberlangsungan aktivitas ekonomi rakyat. Sehingga ekonomi rakyat dapat dengan mudah dimasuki dan ditinggalkan.
3. Beberapa pekerjaan dilakukan oleh satu keluarga, aktivitas ekonomi rakyat dilakukan oleh lebih dari satu pelaku yang berasal dari satu keluarga. Hal ini disebabkan karena ketidakamanan dan keberlanjutan yang sulit diramalkan dalam ekonomi rakyat. Apabila tidak terjadi sesuatu maka akumulasi keuntungan pendapatan dari beberapa aktifitas ekonomi sangat mereka butuhkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar.

4. Kemandirian, karena kesalahan persepsi yang menganggap bahwa ekonomi rakyat merupakan kegiatan ekonomi yang memiliki resiko yang tinggi sehingga berbagai pihak baik sengaja maupun tidak membatasi interaksi dengan sektor ekonomi rakyat.
5. Hubungan dengan sektor formal. Meskipun ekonomi rakyat identik dengan informalitas, namun pada kenyataannya ekonomi rakyat berhubungan dengan sektor formal. Contohnya saja, warung tegal menyediakan makanan murah untuk karyawan perusahaan atau pabrik, penggunaan penjual koran eceran oleh perusahaan penerbitan.

Pemberdayaan ekonomi rakyat dapat dilakukan dengan menggunakan strategi yang berpusat pada upaya mendorong perubahan struktural yang memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional. Perubahan struktural ini meliputi proses perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dan dari ketergantungan ke kemandirian Kartasmita (1996) dalam Sumodiningrat (2002). Sehingga ekonomi rakyat dapat menjadi ekonomi yang kuat, besar, dan modern, dan berdaya saing tinggi. Praktek pemberdayaannya dapat dibedakan menjadi dua menurut sasarannya (Sumodiningrat, 2002). *Pertama*, pemberdayaan masyarakat modern yang telah maju lebih diarahkan pada penciptaan iklim yang menunjang dan peluang untuk tetap maju, sekaligus pada penanaman pengertian bahwa suatu saat mereka wajib membantu yang lemah. *Kedua*, pemberdayaan masyarakat yang masih tertinggal tidak cukup hanya dengan meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama, dan memberikan suntikan modal, tetapi juga dengan menjamin adanya kerja sama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dan yang lemah atau belum berkembang. Pemberdayaan masyarakat perlu dilaksanakan dengan prinsip-prinsip kemitraan yang saling menguntungkan.

2.10 Tinjauan Industri

2.10.1 Definisi Industri Kecil

Pengertian industri kecil sampai saat ini belum terdapat kesepakatan di kalangan para ahli maupun lembaga-lembaga terkait. Namun ada beberapa kriteria yang bisa digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan gambaran mengenai industri kecil. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 133/M/SK/8/1979, industri kecil dibagi dalam 4 (empat) golongan, yaitu :

1. Industri kecil yang mempunyai kaitan erat dengan industri menengah dan industri besar :
 - a. Industri yang menghasilkan barang-barang yang diperlukan oleh industri menengah dan besar.
 - b. Industri kecil yang membutuhkan produk-produk dari industri menengah dan besar.
 - c. Industri kecil yang memerlukan bahan-bahan limbah dari industri besardan menengah.
2. Industri yang berdiri sendiri, yaitu industri yang langsung menghasilkan barang-barang untuk konsumen. Industri ini tidak mempunyai kaitan dengan industri lain.
3. Industri yang menghasilkan barang-barang seni.
4. Industri yang mempunyai pasaran lokal dan bersifat pedesaan.

Keberadaan pengusaha kecil dalam kancah perekonomian nasional memiliki peranann yang besar dan telah memberikan andil bagi pertumbuhan ekonomi yang dicapai selama ini. Menurut Lawang (2004) namun demikian, bukan berarti bahwa pengusaha kecil sudah tidak perlu lagi mendapat perhatian, mengingat masih banyak kelemahan yang mereka miliki sehingga dalam menghadapi persaingan global nantinya tidak akan tertindas dan punah. (Lawang,2004) dengan memperhatikan peranannya yang sangat potensial bagi pembangunan disektor ekonomi, maka usaha kecil perlu terus dibina dan diberdayakan secara berkelanjutan agar mampu lebih berkembang dan maju guna menunjang pembagunan disektor ekonomi yaitu :

1. Usaha kecil merupakan penyerap tenaga kerja.
2. Usaha kecil merupakan penghasil barang dan jasa pada tingkat harga yang terjangkau bagi kebutuhan rakyat banyak berpenghasilan rendah.
3. Usaha kecil merupakan penghasil devisa negara yang potensial, karena dalam keberhasilannya memproduksi hasil nonmigas.
4. Berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung dengan usaha Menengah atau Usaha Besar.
5. Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Dengan demikian, industri kecil merupakan bagian dari industri nasional yang mempunyai misi utama adalah penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penyedia barang dan jasa serta berbagai komposisi baik untuk keperluan pasar dalam negeri maupun luar negeri. Sedangkan pengertian industri kecil Menurut UU RI No. 5 tahun 1984 Pasal 1 tentang perindustrian, definisi industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Sesuai dengan pasal 5 UU RI No. 5 Tahun 1984, Pemerintah menetapkan sebagai berikut:

1. Pemerintah menetapkan bidang usaha industri yang masuk dalam kelompok industri kecil, termasuk industri yang menggunakan ketrampilan tradisional dan industri penghasil benda seni, yang dapat diusahakan hanya oleh Warga Negara Republik Indonesia
2. Pemerintah menetapkan jenis-jenis industri yang khusus dicadangkan bagi kegiatan industri kecil yang dilakukan oleh masyarakat dari golongan ekonomi lemah.

Menurut UU RI No. 9 tahun 1995 tentang industri kecil, maka batasan industri kecil didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan, bertujuan untuk memproduksi barang ataupun jasa untuk diperniagakan secara komersial, yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta, dan mempunyai nilai

penjualan per tahun sebesar Rp. 1 milyar atau kurang. Batasan mengenai skala usaha menurut BPS, yaitu berdasarkan kriteria jumlah tenaga kerja, mulai dicobakan di lingkungan Depperindag, yaitu:

1. Industri mikro : 1 – 4 orang
2. Industri kecil : 5 – 19 orang
3. Industri menengah : 20 – 99 orang

Menurut penjelasan atas Undang-Undang RI No. 9 tahun 1995 tentang Industri Kecil Informal adalah usaha yang belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum, antara lain petani penggarap, industri rumah tangga pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, dan pemulung.

2.10.2 Karakteristik Industri Kecil

Hasibuan (2001) menyatakan industri kecil merupakan industri yang berskala kecil merupakan industri yang diusahakan untuk menambah pendapatan keluarga. Adapun ciri-ciri industri kecil adalah sebagai berikut :

1. Unit industri pedesaan terbanyak merupakan unit-unit industri rumah tangga dan kerajinan rakyat yang mempunyai pekerja 5 atau kurang.
2. Sebagian pekerja datang dari rumah tangga sendiri yang kadang-kadang tidak diberi gaji atau dari kerabat yang dikenal. Sekalipun demikian walaupun para pekerja mendapat upah, tetapi sifat hubungan dengan pengusaha adalah sangat tidak resmi.
3. Teknologi yang dipakai sederhana dan dikerjakan dengan tangan (manual).
4. Bahan baku sebagian besar didapat dari daerah itu sendiri atau dari tempat terdekat.
5. Cara memasarkan barang-barang yang dihasilkan tidak dengan promosi maupun *advertensi* melainkan melalui perantara.
6. Mempunyai peran didalam memberi nafkah dan peningkatan pendapatan keluarga pengrajin, disamping menaikkan kesejahteraan masyarakat pedesaan juga membuka lebih banyak kesempatan kerja dan meratakan pendapatan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, pasal 1 ayat 1 menyatakan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang.

Kriteria usaha kecil dalam Undang-Undang tersebut tercantum dalam pasal 5 ayat 1, yang menyatakan bahwa:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan tempat usaha, atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
3. Milik Warga Negara Indonesia.

2.11 Tinjauan Kesejahteraan

Kesejahteraan menurut Soembodo (2009) tidak hanya mengacu pada pemenuhan kebutuhan fisik orang atau pun keluarga sebagai entitas, tetapi juga kebutuhan psikologisnya. Suharto (2009) mengartikan kesejahteraan sebagai kondisi sejahtera (*well-being*). Pengertian ini biasanya menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Pengertian ini disebut Soembodo (2009) sebagai kesejahteraan materi dan kesejahteraan non-materi.

Kesejahteraan materi, antara lain pendapatan, pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan, pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Sedangkan kesejahteraan non-materi, antara lain agama, interaksi sosial, dan hal-hal lain yang menyangkut aspek psikososial seperti rasa bahagia, bangga, puas, tidak takut, merasa sehat, merasa diterima, dan merasa diakui. Sedangkan menurut (Sadiwak, 1985) kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima, namun tingkatan kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut. Konsumsi itu sendiri pada hakekatnya bukan hanya sesuatu yang mengeluarkan biaya, karena dalam beberapa hal konsumsi juga dapat dilakukan tanpa menimbulkan biaya konsumennya. BPS (1995) menyebutkan berbagai aspek mengenai indikator kesejahteraan, antara lain :

1. *Kependudukan* : penanganan masalah kependudukan tidak hanya mengarahkan pada upaya pengendalian jumlah penduduk akan tetapi mengarah juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
2. *Kesehatan dan gizi* : kualitas fisik penduduk merupakan salah satu aspek penting kesejahteraan, yang dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk dengan menggunakan indikator utama angka kematian bayi dan angka harapan hidup. Status kesehatan yang diukur melalui angka kesakitan dan status gizi juga merupakan aspek penting yang turut mempengaruhi kualitas fisik penduduk.
3. *Pendidikan* : tidak semua anak Indonesia dapat menikmati kesempatan pendidikan dasar. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kemiskinan. Dengan ini diasumsikan bahwa semakin tinggi pendidikan yang dicapai suatu masyarakat, maka dapat dikatakan masyarakat tersebut semakin sejahtera.
4. *Ketenagakerjaan* : ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting yang tidak hanya untuk mencapai kepuasan tetapi juga untuk memenuhi perekonomian rumah tangga dan kesejahteraan seluruh masyarakat.
5. *Taraf dan pola konsumsi* : jumlah penduduk miskin merupakan indikator yang cukup baik untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat. Aspek lain yang perlu dipantau berkenaan dengan peningkatan pendapatan penduduk tersebut adalah bagaimana pendapatan tersebut terdistribusi diantara kelompok penduduk. Indikator distribusi pendapatan, walaupun didekati dengan pengeluaran akan memberikan petunjuk aspek pemerataan yang telah tercapai. Dari data pengeluaran dapat juga diketahui tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum dengan menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan.
6. *Perumahan dan lingkungan* : semakin baik fasilitas yang dimiliki, dapat diasumsikan semakin sejahtera rumah tangga yang menempati rumah tersebut. Berbagai fasilitas yang dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan tersebut antara lain dapat dilihat dari luas lantai rumah, sumber air minum, fasilitas buang air besar rumah tangga, dan tempat penampungan kotoran akhir (jamban).

7. *Sosial dan budaya* : semakin banyak seseorang memanfaatkan waktu luang untuk melakukan kegiatan sosial budaya maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut memiliki tingkat kesejahteraan yang semakin meningkat. Pembahasan mengenai sosial budaya lebih difokuskan pada kegiatan sosial budaya yang mencerminkan aspek kesejahteraan, seperti melakukan perjalanan wisata dan akses pada informasi dan hiburan, yang mencakup menonton televisi, mendengarkan radio dan membaca surat kabar.

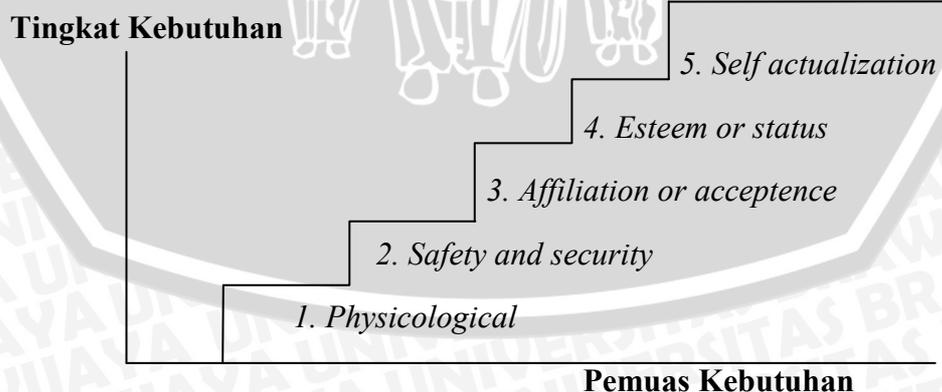
Namun Munir (2008) memberikan gambaran tentang cara yang lebih baik untuk mengukur kesejahteraan dalam sebuah rumahtangga mengingat sulitnya memperoleh data yang akurat. Cara yang dimaksud adalah dengan mengukur pola konsumsi rumahtangga. Pola konsumsi rumahtangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumahtangga atau keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumahtangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumahtangga tersebut. Semakin besar pengeluaran maka dapat dikatakan bahwa rumah tangga tersebut semakin sejahtera.

Pengukuran kesejahteraan dapat menggunakan tangga kesejahteraan, dimana rumah tangga menggunakan ukuran kesejahteraannya sendiri dan menempatkan dirinya di satu titik. Sehingga dapat diketahui tingkatan kesejahteraannya. Selain itu, dapat juga menggunakan tangga kebutuhan Maslow, sehingga dapat diketahui kebutuhan apa saja yang telah mereka capai dan yang akan mereka capai. Adapun hierarki kebutuhan menurut Maslow adalah sebagai berikut (Hasibuan, 2001):

- 1) *Psychological Needs* (kebutuhan fisik) adalah kebutuhan yang paling utama yaitu kebutuhan untuk mempertahankan hidup, seperti makan, minum, tempat tinggal, dan bebas dari penyakit. Selama kebutuhan ini belum terpenuhi maka manusia tidak akan merasa tenang dan akan berusaha untuk memenuhinya. Kebutuhan dan kepuasan biologis ini akan terpenuhi jika gaji (upah) yang diberikan cukup besar. Jika gaji atau upah karyawan ditingkatkan maka semangat kerja mereka akan meningkat,
- 2) *Safety and Security Needs* (kebutuhan keselamatan dan keamanan) yaitu kebutuhan akan kebebasan dari ancaman jiwa dan harta di lingkungan kerja, merupakan tangga kedua dalam susunan kebutuhan. Karyawan membutuhkan

rasa aman terhadap ancaman dan bahaya kehilangan pekerjaan dan penghasilan,

- 3) *Affiliation or Acceptance Needs* (kebutuhan sosial) yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh orang lain di lingkungan tempat hidup dan bekerja, kebutuhan akan perasaan dihormati, kebutuhan akan perasaan maju dan tidak gagal, kebutuhan akan ikut serta. Pada tingkat ini apabila karyawan tidak diterima menjadi anggota kelompok informal dalam perusahaan, maka ia akan merasa terkucil dan tidak senang. Hal ini mengakibatkan karyawan tidak bekerja dengan baik dan prestasinya menurun.
- 4) *Esteem or Status Needs* (kebutuhan akan penghargaan *prestise*) yaitu kebutuhan akan penghargaan dari orang lain. Berarti bahwa setiap karyawan yang bekerja dengan baik ingin mendapatkan pujian atau penghargaan atasan atau rekan sekerjanya, dan
- 5) *Self Actualization Needs* (kebutuhan aktualisasi diri) yaitu realisasi lengkap potensi seseorang secara penuh. Untuk pemenuhan kebutuhan ini biasanya seseorang bertindak bukan atas dorongan orang lain, tetapi atas kesadaran dan keinginan diri sendiri. Dalam hal ini karyawan merasa telah berhasil menyelesaikan pekerjaannya dengan mengerahkan segala kemampuan, ketrampilan dan potensi yang ada secara maksimum. Maslow menggambarkan tingkat kebutuhan tersebut seperti pada Gambar 2 dibawah ini :



Sumber: Hasibuan, 2001(diolah).

Gambar 2. Hierarki Kebutuhan Maslow

Kebutuhan-kebutuhan yang disebut pertama (fisiologis) dan kedua (keamanan) kadang-kadang diklasifikasikan dengan cara lain, misalnya dengan menggolongkannya sebagai kebutuhan primer, sedangkan yang lainnya dikenal pula dengan klasifikasi kebutuhan sekunder. Terlepas dari cara membuat klasifikasi kebutuhan manusia itu, yang jelas adalah bahwa sifat, jenis, dan intensitas kebutuhan manusia berbeda satu orang dengan yang lainnya karena manusia merupakan individu yang unik. Kebutuhan manusia itu tidak hanya bersifat materi, akan tetapi bersifat psikologikal, mental, intelektual, dan bahkan juga spiritual. Teori “klasik” Maslow semakin dipergunakan, bahkan dikatakan mengalami “koreksi”. Penyempurnaan atau “koreksi” tersebut terutama diarahkan pada konsep “hierarki kebutuhan” yang dikemukakan oleh Maslow. Istilah “hierarki” dapat diartikan sebagai tingkatan atau secara analogi berarti anak tangga. Logikanya ialah bahwa menaiki suatu tangga berarti dimulai dengan anak tangga yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya.

Jika konsep tersebut diaplikasikan pada pemuasan kebutuhan manusia, berarti seseorang tidak akan berusaha memuaskan kebutuhan tingkat kedua, dalam hal ini keamanan sebelum kebutuhan tingkat pertama yaitu sandang, pangan, dan papan terpenuhi; yang ketiga tidak akan diusahakan pemuasan sebelum seseorang merasa aman, demikian pula seterusnya. Berangkat dari kenyataan bahwa pemahaman tentang berbagai kebutuhan manusia makin mendalam penyempurnaan dan “koreksi” dirasakan bukan hanya tepat, akan tetapi juga memang diperlukan karena pengalaman menunjukkan bahwa usaha pemuasan berbagai kebutuhan manusia berlangsung secara simultan. Artinya, sambil memuaskan kebutuhan fisik, seseorang pada waktu yang bersamaan ingin menikmati rasa aman, merasa dihargai, memerlukan teman serta ingin berkembang.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa lebih tepat apabila berbagai kebutuhan manusia digolongkan sebagai rangkaian dan bukan sebagai hierarki. Dalam hubungan ini, perlu ditekankan bahwa :

- a) Kebutuhan yang suatu saat sudah terpenuhi sangat mungkin akan timbul lagi di waktu yang akan datang
- b) Pemuasaan berbagai kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan fisik, bisa bergeser dari pendekatan kuantitatif menjadi pendekatan kualitatif dalam pemuasannya.
- c) Berbagai kebutuhan tersebut tidak akan mencapai “titik jenuh” dalam arti tibanya suatu kondisi dalam mana seseorang tidak lagi dapat berbuat sesuatu dalam pemenuhan kebutuhan itu.

Kendati pemikiran Maslow tentang teori kebutuhan ini tampak lebih bersifat teoritis, namun telah memberikan pondasi dan mengilhami bagi pengembangan teori-teori motivasi yang berorientasi pada kebutuhan berikutnya yang lebih bersifat aplikatif. Maslow dikutip oleh Stoner dan Freeman (1994) membagi kelima jenjang tersebut menjadi dua kebutuhan yaitu kebutuhan tingkat tinggi dan kebutuhan tingkat rendah, sedangkan yang termasuk kebutuhan tingkat tinggi adalah kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri, sedangkan kebutuhan tingkat rendah adalah kebutuhan fisiologis dan kebutuhan rasa aman.

2.12 Kriteria Keluarga Sejahtera

Indikator Keluarga Sejahtera pada dasarnya berangkat dari pokok pikiran yang terkandung didalam undang-undang no. 10 Tahun 1992 disertai asumsi bahwa kesejahteraan merupakan variabel komposit yang terdiri dari berbagai indikator yang spesifik dan operasional. Karena indikator yang dipilih akan digunakan oleh kader di desa, yang pada umumnya tingkat pendidikannya relatif rendah, untuk mengukur derajat kesejahteraan para anggotanya dan sekaligus sebagai pegangan untuk melakukan melakukan intervensi, maka indikator tersebut selain harus memiliki validitas yang tinggi, juga dirancang sedemikian rupa, sehingga cukup sederhana dan secara operasional dapat di pahami dan dilakukan oleh masyarakat di desa.

Atas dasar pemikiran di atas, maka indikator dan kriteria keluarga sejahtera yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

2.12.1 Keluarga Pra Sejahtera

Adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasarnya (*basic needs*). Sebagai keluarga Sejahtera I, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, papan, sandang dan kesehatan.

2.12.2 Keluarga Sejahtera Tahap I

Adalah keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal yaitu:

- a. Melaksanakan ibadah menurut agama oleh masing-masing anggota keluarga.
- b. Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 (dua) kali sehari atau lebih.
- c. Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.
- d. Bagian yang terluas dari lantai rumah bukan dari tanah.
- e. Bila anak sakit atau pasangan usia subur ingin ber KB dibawa kesarana/petugas kesehatan.

2.12.3 Keluarga Sejahtera tahap II

Yaitu keluarga - keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kriteria keluarga sejahtera I, harus pula memenuhi syarat sosial psikologis 6 sampai 14 (a-n) yaitu :

- a. Anggota Keluarga melaksanakan ibadah secara teratur.
- b. Paling kurang, sekali seminggu keluarga menyediakan daging/ikan/telur sebagai lauk pauk.
- c. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru per tahun.
- d. Luas lantai rumah paling kurang delapan meter persegi tiap penghuni rumah.
- e. Seluruh anggota keluarga dalam 3 bulan terakhir dalam keadaan sehat.
- f. Paling kurang 1 (satu) orang anggota keluarga yang berumur 15 tahun keatas mempunyai penghasilan tetap.
- g. Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-60 tahun bisa membaca tulisan latin.

- h. Seluruh anak berusia 5 - 15 tahun bersekolah pada saat ini.
- i. Bila anak hidup 2 atau lebih, keluarga yang masih pasangan usia subur memakai kontrasepsi (kecuali sedang hamil)

2.12.4 Keluarga Sejahtera Tahap III

Yaitu keluarga yang memenuhi syarat 1 sampai 14 dan dapat pula memenuhi syarat 15 sampai 21, syarat pengembangan keluarga yaitu :

- a. Mempunyai upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama.
- b. Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan keluarga untuk tabungan keluarga.
- c. Biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari dan kesempatan itu dimanfaatkan untuk berkomunikasi antar anggota keluarga.
- d. Ikut serta dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.
- e. Mengadakan rekreasi bersama diluar rumah paling kurang 1 kali/6 bulan.
- f. Dapat memperoleh berita dari surat kabar/TV/majalah.
- g. Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi yang sesuai dengan kondisi daerah setempat.

2.12.5 Keluarga Sejahtera Tahap III Plus

Keluarga yang dapat memenuhi kriteria I sampai 21 dan dapat pula memenuhi kriteria 22 dan 23 kriteria pengembangan keluarganya yaitu :

- a. Secara teratur atau pada waktu tertentu dengan sukarela memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materiil.
- b. Kepala Keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan/yayasan/institusi masyarakat.

2.12.6 Keluarga Miskin

Adalah keluarga Pra Sejahtera alasan ekonomi dan KS - I karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi :

- a. Paling kurang sekali seminggu keluarga makan daging/ikan/telor.
- b. Setahun terakhir seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru.
- c. Luas lantai rumah paling kurang 8 m² untuk tiap penghuni.

2.12.7 Keluarga miskin sekali

Adalah keluarga Pra Sejahtera alasan ekonomi dan KS - I karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi :

- a. Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih.
- b. Anggota keluarga memiliki pakaian berbeda untuk dirumah, bekerja/sekolah dan bepergian.
- c. Bagian lantai yang terluas bukan dari tanah.

